

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEPATUHAN PENGUNGKAPAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

(Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Sumatera)

Sri Suranta*

Oktovian Siregar

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Sebelas Maret

*srisuranta@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to know the effect of local government's characteristics, which are the local government's administrative age, the size of its investments, the number of SKPDs (working units), the educational background of the head of the local government and intergovernmental revenues, on the compliance of local government investment disclosures and compare the compliance of local government investments disclosures between local governments in Java and Sumatera. The sampling method used is purposive sampling. The study sample consists of 102 district/city governments that report the Local Government Financial Statements for Fiscal Year 2013 and have been audited by the Indonesia's Supreme Audit Board in 2014. This study uses multiple regression analysis and t-test procedure and also does the classical assumptions test including normality, autocorrelation, heteroscedasticity, and multicollinearity test using Statistical Package for the Social Sciences

on the disclosure of local government investments, while the size of its investments, the number of SKPDs (working units), the educational background of the head of the local government and intergovernmental revenues have no significant effect on the disclosure of local government investments.

Keywords: *local government investment disclosures, local government financial statements, organizational theory, characteristics of an organization.*

PENDAHULUAN

Investasi dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Karena pentingnya manfaat investasi tersebut, laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) menyatakan bahwa nilai rerata pengungkapan wajib pemerintah daerah di Indonesia tahun 2006 adalah sebesar 51,56%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan

pemerintah daerah di Indonesia masih rendah.

Dari data hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2014, diketahui bahwa masih terdapat permasalahan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia khususnya dalam pengungkapan pos-pos investasi. Misalnya investasi dalam bentuk penyertaan modal pada beberapa BUMD oleh Pemerintah Kabupaten Badung sebesar Rp889,2 miliar yang tidak diyakini kewajaran nilainya karena dokumen pendukung yang tidak memadai. Permasalahan lain yang banyak

terjadi pada investasi pemerintah daerah di Indonesia adalah pada pengelolaan dan pengungkapan dana bergulir. Permasalahannya antara lain beberapa pemerintah daerah belum memiliki kebijakan akuntansi yang mengatur mengenai penyisihan piutang tak tertagih agar dapat menyajikan nilai investasi dana bergulir berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah daerah tidak mampu mengawasi dan mengelola penggunaan dana bergulir oleh masyarakat sehingga banyak terjadi dana bergulir yang macet dan bahkan tidak dapat ditelusuri keberadaannya yang dapat merugikan keuangan daerah.

Penelitian terdahulu secara umum meneliti pengungkapan keseluruhan pos-pos neraca, sedangkan penelitian ini secara spesifik meneliti pengungkapan pos investasi serta membandingkan kualitas pengungkapan pemerintah-pemerintah daerah di dua wilayah yang berbeda yaitu di Pulau Jawa dan Sumatera. Selain itu penelitian sebelumnya atas pengungkapan pos investasi hanya mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 06 (PSAP 06) tentang Akuntansi Investasi, sedangkan penelitian ini mencakup juga Buletin Teknis SAP Nomor 7 tentang Akuntansi Dana Bergulir (salah satu komponen investasi) yang baru ditetapkan pada bulan Agustus 2008.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah memenuhi kewajiban pengungkapan investasinya dan apakah pemerintah daerah memiliki kemampuan yang merata dalam memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengungkapan investasi dengan mempertimbangkan karakteristik yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang dan judul penelitian, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Apakah karakteristik suatu pemerintah daerah mempengaruhi kualitas

pengungkapan investasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah?

2. Apakah terdapat perbedaan kepatuhan pengungkapan antara pemerintah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik daerah terhadap kepatuhan pengungkapan investasi serta membandingkan kepatuhan pengungkapan investasi antara pemerintah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera.

LANDASAN TEORI

Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan. Khusus untuk pengungkapan yang berkaitan dengan investasi pemerintah daerah, PSAP 06 dan Buletin Teknis 07 mewajibkan pemerintah daerah untuk mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: (1) Bentuk investasi, (2) Klasifikasi investasi, (3) Pengakuan investasi, (4) Pengukuran investasi, (5) Metode penilaian investasi, (6) Pengakuan hasil investasi, (7) Pelepasan dan pemindahan investasi, (8) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi, (9) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen, (10) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang, (11) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut, (12) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya, (13) Perubahan pos investasi, (14) Dasar penilaian dana bergulir, (15) Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya, (16) Besarnya suku bunga yang dikenakan, (17) Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir, dan

(18) Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

Teori Organisasi dan Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah

Teori organisasi adalah suatu studi mengenai bagaimana organisasi berfungsi dan bagaimana organisasi tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia beroperasi (Jones, 2010). Organisasi membentuk kehidupan kita, dan para manajer yang memperoleh informasi tentang organisasi dengan baik dapat membentuk organisasi, dan langkah pertama untuk memahami organisasi adalah dengan melihat ciri-ciri/karakteristik yang menggambarkan sifat-sifat desain organisasional yang spesifik (Daft, 2012). Dengan kata lain, melalui pemahaman ciri-ciri/karakteristik organisasi, para manajer dapat membentuk dan mengelola organisasi agar dapat berfungsi dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Rogers (2003, dalam Patrick, 2007) menyebutkan bahwa penelitian-penelitian mengenai *organizational innovativeness* membantu mengidentifikasi pola dan karakteristik organisasi yang inovatif. Penelitian-penelitian tersebut menghasilkan temuan yang konsisten mengenai karakteristik-karakteristik yang berkaitan dengan adopsi dan implementasi dari inovasi (Rogers (2003, dalam Patrick, 2007)). Patrick (2007) mengadaptasi model dari *organizational innovativeness* Rogers (2003) dalam meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi organisasi dalam mengadopsi GASB 34 dengan mengelompokkan karakteristik organisasi ke dalam budaya organisasi, struktur organisasi, dan lingkungan eksternal.

Karakteristik pemerintah daerah dapat menjelaskan kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah sehingga karakteristik pemerintah daerah merupakan prediktor kepatuhan pengungkapan wajib (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011). Dalam penelitian tentang kepatuhan pengungkapan wajib, Suhardjanto, *etal.* (2010) dalam Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) menggunakan dua

komponen karakteristik organisasi dari model yang dikembangkan Patrick (2007) yaitu struktur organisasi (*municipality size, municipality wealth, functional differentiation, municipality age, educational background of the head of municipality*) dan lingkungan eksternal (*municipality debt financing dan intergovernmental revenue*).

Dengan mengacu pada penelitian Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011), penelitian ini menguji pengaruh karakteristik daerah terhadap kepatuhan pengungkapan investasi dengan menggunakan dua komponen karakteristik organisasi di atas, yaitu struktur organisasi (umur administratif pemerintah daerah, *size* investasi, jumlah SKPD (diferensiasi fungsional), latar belakang pendidikan kepala daerah) dan lingkungan eksternal (*intergovernmental revenue*). Dengan memahami ciri-ciri/karakteristik organisasi (dalam hal ini pemerintah daerah), para manajer (kepala daerah) dapat membentuk dan mengelola organisasinya agar dapat melaksanakan fungsi dengan baik, salah satunya yaitu mengungkapkan laporan keuangannya, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengaruh Umur Administratif Pemerintah Daerah terhadap Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah

Umur suatu organisasi dapat diartikan sebagai seberapa lama organisasi tersebut berlangsung sejak didirikannya. Pemerintah daerah dengan umur administratif yang lebih lama akan semakin berpengalaman dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyajikan laporan keuangannya secara wajar sesuai dengan SAP (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Dalam penelitian Suhardjanto dan Lesmana (2010), hasilnya menunjukkan bahwa umur administratif pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan wajib LKPD. Dari uraian tersebut, disusun hipotesis sebagai berikut:

H1: Umur Administratif Pemerintah Daerah berpengaruh positif

terhadap Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah.

Pengaruh *Size* Investasi terhadap Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah

Ukuran organisasi menunjukkan seberapa besar organisasi pemerintah daerah tersebut (Patrick, 2007). Karena investasi pemerintah daerah digunakan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, maka besarnya investasi akan mendorong pengungkapan dalam laporan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan kepada masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan Cooke (1992) dan Patrick (2007) menunjukkan bahwa ukuran organisasi berhubungan positif signifikan dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Dari uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H2: *Size* Investasi berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah.

Pengaruh Jumlah SKPD terhadap Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah

Diferensiasi fungsional menunjukkan sejauh mana sebuah organisasi dibagi menjadi departemen fungsional (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Patrick (2007) menemukan bahwa pemerintah daerah di Pennsylvania dengan tingkat diferensiasi fungsional yang lebih tinggi akan cenderung untuk lebih mengadopsi Governmental Accounting Standards Board (GASB) 34 dibandingkan dengan yang tingkat diferensiasi fungsionalnya rendah. Dalam struktur pemerintahan Indonesia, pembagian departemen fungsional direpresentasikan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Semakin banyak jumlah SKPD berarti semakin banyak dan kompleksnya laporan yang harus disusun sehingga tingkat pengungkapan yang dilakukan semakin besar. Dari uraian tersebut, disusun hipotesis sebagai berikut:

H3: Jumlah SKPD berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah.

Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah

Intergovernmental revenue adalah jenis pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah (Patrick, 2007). *Intergovernmental revenue* yang dikategorikan sebagai lingkungan eksternal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial (Darmastuti dan Setyaningrum, 2012). Semakin besar dana perimbangan yang diperoleh pemerintah daerah mendorong tingkat pengungkapan yang lebih besar kepada pihak pemerintah pusat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dari pernyataan tersebut disusun hipotesis sebagai berikut:

H4: *Intergovernmental Revenue* berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah.

Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah terhadap Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah

Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah dituntut untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang memiliki latar belakang ekonomi atau akuntansi akan lebih mudah dalam memahami dan menerapkan standar akuntansi pemerintahan dalam penyajian laporan keuangannya sehingga laporan keuangan menyajikan informasi yang dibutuhkan para pengguna laporan keuangan. Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) menemukan bahwa latar belakang pendidikan bupati merupakan prediktor yang signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan

SAP yang wajib. Dari uraian tersebut, maka disusun hipotesis:

H5: Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah.

Perbandingan antara Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah di Jawa dan Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah di Sumatera

Abdullah (2004) dalam Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) berpendapat bahwa pengendalian sosial dari pemangku kepentingan di luar pemerintahan terhadap pelaksanaan pelayanan publik di luar Pulau Jawa/Bali tidak sebaik di Pulau Jawa/Bali. Adanya pengendalian sosial tersebut akan mendorong pemerintah untuk mengungkapkan elemen pengungkapan wajib sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan logika tersebut, maka disusun hipotesis:

H6: Terdapat perbedaan antara Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah di Jawa dan Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah di Suma

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Sumatera sebanyak 265 entitas. Laporan keuangan pemerintah daerah yang dijadikan sampel adalah laporan keuangan Tahun Anggaran 2013 yang diaudit oleh BPK pada Semester I Tahun 2014. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder (*secondary data*), yaitu data yang dikumpulkan oleh seseorang selain peneliti yang sedang melakukan penelitian tersebut (Sekaran dan Bougie, 2013). Data-data keuangan dan jumlah satuan kerja dalam penelitian ini bersumber dari Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Adapun data umur administratif pemerintah daerah dan latar belakang pendidikan kepala daerah diperoleh dari situs resmi masing-masing pemerintah daerah.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian agar dapat diukur dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun definisi operasional dan pengukuran masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut:

Variabel Dependen

Penelitian ini menggunakan tingkat Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah dalam komponen Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan PSAP 06 dan Buletin Teknis SAP 07 sebagai variabel dependen. Pengukuran tingkat pengungkapan dilakukan dengan menggunakan sistem *scoring* dengan mengadopsi penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum dan Syafitri (2012). Sistem *scoring* yang dimaksud adalah dengan membuat daftar *checklist* pengungkapan yang diwajibkan PSAP 06 dan Buletin Teknis 07.

Mekanisme yang dilakukan dalam mengukur tingkat pengungkapan adalah: (1) Membuat daftar pengungkapan berdasarkan PSAP 06 dan Buletin Teknis 07, (2) Memberikan nilai untuk setiap pengungkapan dalam LKPD sesuai dengan daftar pengungkapan. Pemberian nilai dibagi menjadi tiga bagian, yaitu “ya”, “tidak”, dan “*not available*”. Setiap satu *item* pengungkapan yang sesuai dengan daftar pengungkapan diberi nilai 1, jika tidak diungkapkan maka diberi nilai 0, sedangkan “*not available*” *item* pengungkapan tersebut tidak dapat diaplikasikan, (3) Menjumlahkan nilai-nilai yang didapat untuk setiap LKPD, dan (4) Menghitung tingkat pengungkapan dengan

membagi jumlah nilai yang diperoleh dengan nilai maksimum yang seharusnya diperoleh jika melakukan pengungkapan penuh.

Dengan demikian, tingkat Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah dapat dihitung dengan rumus:

$$INVDISC = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Total item yang harus diungkapkan}}$$

Variabel Independen

Variabel independen pada penelitian ini adalah karakteristik Pemerintah Daerah, yaitu Umur Administratif Pemerintah Daerah, *Size* Investasi, Jumlah SKPD, *Intergovernmental Revenue*, dan Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah.

berlangsung sejak didirikan (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Pendirian suatu pemerintah daerah didasari oleh penetapan undang-undang pembentukan pemerintah daerah. Suhardjanto dan Lesmana (2010) mengukur variabel independen umur pemerintah daerah berdasarkan sejak diterbitkannya peraturan perundang-undangan pembentukan daerah yang bersangkutan dan dinyatakan dalam satuan tahun.

Umur Administratif Pemerintah Daerah

Umur suatu organisasi dapat diartikan seberapa lama organisasi tersebut

$$AGE = 2013 - (\text{tahun penetapan undang-undang pembentukan pemerintah daerah})$$

Size Investasi

Setyaningrum dan Syafitri (2012) menggunakan total aset Pemerintah Daerah sebagai proksi untuk variabel ukuran Pemerintah Daerah karena aset menunjukkan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh. Karena penelitian ini secara spesifik meneliti pengungkapan investasi maka ukuran/*size* yang digunakan adalah total investasi pemerintah daerah yang diubah ke dalam logaritma natural.

$$LnTOTINV = Ln(\Sigma \text{ investasi})$$

Jumlah SKPD

Dalam struktur Pemerintah daerah, pembagian departemen fungsional atau subunit disebut dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa SKPD merupakan entitas akuntansi yang diwajibkan menyusun dan menyampaikan

laporan keuangan. Jumlah SKPD dianalogikan sebagai segmen bisnis dalam perusahaan sehingga semakin banyak segmen bisnis, semakin banyak hal yang harus diungkapkan. Hilmi dan Martani (2011) menggunakan jumlah SKPD sebagai proksi untuk mengukur diferensiasi fungsional.

$$SKPD = \Sigma \text{ satuan kerja perangkat daerah}$$

Intergovernmental Revenue

Patrick (2007) mendefinisikan *intergovernmental revenue* sebagai jenis

pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi

Pemerintah Daerah. Patrick (2007) menghitung *intergovernmental revenue* dengan membagi total *intergovernmental revenue* dengan total pendapatan. Di Indonesia, *intergovernmental revenue* biasa

dikenal dengan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Sumarjo (2010) menggunakan perbandingan antara total dana perimbangan dengan total pendapatan.

$$INTREV = \frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah

Kepala daerah yang memiliki latar belakang akuntansi akan lebih mudah memahami dan menerapkan standar akuntansi pemerintahan sehingga laporan keuangannya menyajikan informasi yang dibutuhkan para pengguna laporan keuangan. Menurut Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011), latar belakang pendidikan Bupati berpengaruh signifikan dalam tingkat pengungkapan wajib LKPD. Variabel ini merupakan variabel *dummy*, di mana pengukurannya yaitu jika latar belakang kepala daerah dan/atau wakilnya adalah ekonomi, maka bernilai 1. Jika bukan berlatar belakang ekonomi maka bernilai 0.

Persamaan regresi berganda dalam pengujian hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

$$INVDISC = \beta_0 + \beta_1 AGE + \beta_2 LnTOTINV + \beta_3 SKPD + \beta_4 INTREV + \beta_5 PEND + e$$

Keterangan :
INVDISC : Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah

AGE : Umur Administratif Pemerintah Daerah
LnTOTINV : *Size* Investasi
SKPD : Jumlah SKPD
INTREV : *Intergovernmental Revenue*
PEND : Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah
e : *errors*

Koefisien regresi variabel independen yang bernilai positif (+) menunjukkan adanya hubungan berbanding lurus dengan variabel dependen. Sebaliknya, koefisien regresi variabel independen yang bernilai negatif (-) menunjukkan adanya hubungan yang berbanding terbalik dengan variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Sumatera sebanyak 265 entitas. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Jumlah dan proses pengambilan sampel dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Sampel dan Observasi Penelitian

Kriteria	Jumlah
a. pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Sumatera.	265
b. Laporan keuangan belum diaudit oleh BPK RI.	(15)
c. Laporan keuangan yang tidak memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar Dengan Pengecualian dari BPK.	(8)
d. Data yang tidak lengkap untuk pengukuran setiap variabel.	(91)
Jumlah observasi dalam penelitian	151

<i>Outlier</i>	(49)
Jumlah sampel yang digunakan	102

Sumber: Data diolah

Statistik deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini memberikan gambaran umum mengenai karakteristik variabel penelitian meliputi nilai rata-rata (*mean*), nilai

tertinggi/maksimum, nilai terendah/minimum, serta nilai standar deviasi yang menggambarkan penyebaran data. Deskripsi dari data penelitian disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

<i>Variabel</i>	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
<i>AGE</i>	102	5,000	71,000	49,059	21,360
<i>LnTOTINV</i>	102	20,801	28,234	24,737	1,134
<i>SKPD</i>	102	29,000	170,000	54,098	19,498
<i>INTREV</i>	102	0,467	0,962	0,859	0,093
<i>PEND</i>	102	-	1,000	0,333	0,474
<i>INVDISC</i>	102	0,500	0,810	0,653	0,081
<i>Valid N (listwise)</i>	102				

Sumber: Data diolah

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik penelitian ini meliputi normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinieritas. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan hasil uji menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,320 (lebih besar dari $\alpha = 5\%$). Uji autokorelasi menggunakan *Run Test* dengan signifikansi sebesar 0,232 (lebih

menggunakan Uji Glejser dengan hasil menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 5%. Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 pada setiap variabel. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa keempat asumsi klasik telah terpenuhi.

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (uji statistik F, uji statistik t, dan koefisien determinasi) dan uji beda *t-test*.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2013). Berdasarkan Tabel 3, nilai F hasil perhitungan adalah 6,692 sedangkan nilai F tabel adalah 2,309. Karena nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel maka variabel independen secara statistik mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.

Uji statistik F juga digunakan untuk menentukan *goodness of fit* atau kelayakan model regresi yang digunakan dalam melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian. Dari Tabel 3 diketahui bahwa *probability value (p-value)* adalah sebesar 0,000. Karena *p-value* dalam hasil pengujian lebih kecil dari 5%, maka model layak (*fit*) untuk digunakan sebagai model regresi dalam penelitian.

Tabel 3
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Model	Sum of		Mean	F	Sig.
	Squares	Df	Square		
1 Regression	0,173	5	0,035	6,692	0,000 ^b
Residual	0,497	96	0,005		
Total	0,671	101			

a. Dependent Variable: INVDISC

b. Predictors: (Constant), PEND, LnTOTINV, SKPD, INTREV, AGE

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel umur administratif pemerintah daerah (AGE) memiliki *p-value* lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa umur administratif

pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan investasi pemerintah daerah diterima. Sementara itu, variabel *size* investasi (LnTOTINV), jumlah SKPD (SKPD), *intergovernmental revenue* (INTREV), dan latar belakang pendidikan kepala daerah (PEND) memiliki *p-value* lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa variabel-variabel tersebut berpengaruh positif terhadap pengungkapan investasi pemerintah daerah ditolak.

Tabel 4
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	0,515	0,223		
AGE	0,002	0,000	0,433	4,384	0,000
LnTOTINV	0,005	0,008	0,070	0,667	0,507
SKPD	0,000	0,000	0,040	0,425	0,672
INTREV	-0,082	0,086	-0,094	-0,951	0,344
PEND	-0,017	0,015	-0,101	-1,127	0,263

a. Dependent Variable: INVDISC

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2013). Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R²* sebesar 0,220 atau 22,0%. Hasil tersebut

mengindikasikan bahwa variabel-variabel independen dalam *penelitian* ini mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen pengungkapan investasi pemerintah daerah sebesar 22,0%, sedangkan sisanya sebesar 78,0% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
<i>I</i>	0,508 ^a	0,258	0,220	0,07198

a. Predictors: (Constant), PEND, LnTOTINV, SKPD, INTREV, AGE
b. Dependent Variable: INVDISC

Uji Beda T-test

Dari Tabel 6 terlihat bahwa rata-rata pengungkapan investasi pemerintah daerah di Jawa adalah 0,6844 sedangkan pengungkapan investasi pemerintah daerah di Sumatera adalah 0,6095. Secara absolut jelas bahwa rata-rata pengungkapan investasi pemerintah daerah berbeda antara di Pulau Jawa dan Sumatera. Dari Tabel 7 diketahui bahwa F hitung Levene's Test sebesar 0,021 dengan probabilitas 0,885. Karena probabilitas > 0,05 maka disimpulkan bahwa

H₀ tidak dapat ditolak atau memiliki *variance* yang sama. Dengan demikian, analisis uji beda t-test harus menggunakan asumsi *equal variances assumed*. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa nilai t pada *equal variances assumed* adalah 5,123 dengan probabilitas signifikansi 0,000 (*two-tailed*). Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengungkapan investasi pemerintah daerah berbeda secara signifikan antara pemerintah daerah di Jawa dan di Sumatera.

Tabel 6
Group Statistics

<i>LOKASI</i>	<i>N</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>	<i>Std. Error Mean</i>
<i>INVDISC J</i>	59	0,6844	0,07288	0,00949
<i>S</i>	43	0,6095	0,07290	0,01112

Tabel 7
Independent Samples Test

		<i>Levene's Test for Equality of Variances</i>		<i>t-test for Equality of Means</i>						
		<i>F</i>	<i>Sig.</i>	<i>T</i>	<i>Df</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>	<i>Mean Difference</i>	<i>Std. Error Difference</i>	<i>95% Confidence Interval of the Difference</i>	
									<i>Lower</i>	<i>Upper</i>
<i>INVDISC</i>	<i>Equal variances assumed</i>	0,021	0,885	5,123	100	0,000	0,07487	0,01461	0,04588	0,10387
	<i>Equal variances not assumed</i>			5,123	90,645	0,000	0,07487	0,01462	0,04584	0,10390

PEMBAHASAN

Pengaruh Umur Administratif Pemerintah Daerah terhadap Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji signifikansi parameter individual pada Tabel 4, diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi variabel umur administratif pemerintah daerah sebesar 0,000 dengan koefisien regresi 0,515 (positif). Hal tersebut berarti bahwa umur administratif pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan investasi pemerintah daerah pada $\alpha=5\%$. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa umur administratif pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan investasi pemerintah daerah dapat diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian Suhardjanto dan Lesmana (2010) serta Setyaningrum dan Syafitri (2012).

Setyaningrum dan Syafitri (2012) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif yang signifikan antara umur administratif Pemerintah Daerah dan tingkat pengungkapan LKPD disebabkan karena Pemda yang sudah lama berdiri memiliki lebih banyak informasi yang dapat diungkapkan dibandingkan dengan Pemerintah Daerah yang baru berdiri. Dengan kata lain, dengan sistem administrasi dan tata kelola yang sudah mapan yang didukung dengan pengalaman para birokratnya, pemerintah daerah dengan umur administratif yang lebih tua memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya yang terkait dengan kewajiban pengungkapan investasi pemerintah daerah.

Pengaruh Size Investasi terhadap Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah

Walaupun koefisien regresi *size* investasi bernilai positif yaitu 0,005, nilai probabilitas signifikansinya sebesar 0,507 $=5\%$, yang berarti bahwa *size* investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan investasi pemerintah

daerah. Hal ini berarti bahwa hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa *size* investasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan investasi pemerintah daerah ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Darmastuti dan Setyaningrum (2012), Hilmi dan Martani (2011), Miranti (2009) dan Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011).

Pemerintah Daerah dengan *size* yang besar memiliki masalah birokrasi yang lebih besar sehingga mengakibatkan proses penerapan SAP lebih rumit jika dibandingkan dengan pemerintah daerah yang kecil (Suhardjanto dan Yulianingtyas, 2011). Khusus untuk investasi pemerintah daerah dalam bentuk investasi nonpermanen dana bergulir yang dipinjamkan untuk dikelola oleh masyarakat, semakin besar *size* investasinya jelas semakin sulit penatausahannya karena masyarakat penerima dana tersebut tersebar di seluruh wilayah pemerintah daerah tersebut. Selain itu, dana bergulir umumnya diberikan tidak dalam bentuk uang tunai melainkan dalam bentuk hewan ternak atau peralatan tani yang tentunya semakin sulit untuk diawasi penyalurannya, pelunasan pinjamannya maupun pencatatannya.

Pengaruh Jumlah SKPD terhadap Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah

Dari hasil uji signifikansi parameter individual, diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi variabel jumlah SKPD sebesar 0,672. Karena nilai probabilitas signifikansinya lebih besar dari 5%, berarti jumlah SKPD tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan investasi pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa jumlah SKPD berpengaruh positif terhadap pengungkapan investasi pemerintah daerah ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Setyaningrum dan Syafitri (2012), Darmastuti dan Setyaningrum (2012), Hilmi dan Martani (2011), dan Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011).

Setyaningrum dan Syafitri (2012) berpendapat bahwa pemerintah daerah

dengan jumlah SKPD yang besar memiliki birokrasi yang lebih kompleks, sehingga tingkat pengawasan terhadap transaksi-transaksi yang terjadi di pemerintah daerah dapat dikatakan rendah. Hal ini mengakibatkan besarnya potensi pencatatan yang tidak akurat. Terlebih lagi dalam investasi pemerintah daerah khususnya dana bergulir, pengelolaannya membutuhkan koordinasi lintas SKPD karena setiap SKPD memiliki tanggung jawab terpisah antara yang mencairkan dana, menyalurkan, dan mengawasi pelaksanaannya di lapangan.

Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah

Hasil uji signifikansi parameter individual menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi variabel *intergovernmental revenue* sebesar 0,344. Nilai probabilitas signifikansi tersebut lebih besar dari $\alpha=5\%$. Dengan demikian, *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan investasi pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa hipotesis keempat yang menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap pengungkapan investasi pemerintah daerah ditolak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Martani dan Lestari (2010) dan Hilmi dan Martani (2011).

Hilmi dan Martani (2011) berpendapat bahwa kemungkinan dalam era desentralisasi hubungan pemerintah pusat dan daerah tidak terlalu erat sehingga tidak ada monitoring khusus pelaporan keuangan Pemda oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidaklah berdasarkan kepatuhan pelaporan melainkan karena transfer yang bersifat otomatis (Martani dan Lestari, 2010). Dengan kata lain, *intergovernmental revenue* dipandang oleh pemerintah daerah sebagai hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah pusat karena diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah terhadap Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah

Dari hasil uji signifikansi parameter individual, diketahui bahwa nilai probabilitas signifikansi variabel latar belakang pendidikan kepala daerah sebesar 0,263. Karena nilai probabilitas signifikansinya $=5\%$, dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan kepala daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan investasi pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa hipotesis kelima yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan kepala daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan investasi pemerintah daerah ditolak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) dan Darmastuti dan Setyaningrum (2012).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mempunyai kewenangan seperti menetapkan kebijakan-kebijakan tentang pelaksanaan APBD dan menetapkan pejabat-pejabat untuk melaksanakan APBD tersebut. Karena kepala daerah berada pada tingkat penentu kebijakan APBD sementara pelaksanaannya didelegasikan kepada pejabat lain, latar belakang pendidikan kepala daerah baik ekonomi maupun nonekonomi tidak berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan APBD, pelaporan dan pengungkapan keuangan daerah.

Perbandingan antara Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah di Jawa dan Pengungkapan Investasi Pemerintah Daerah di Sumatera

Dari hasil uji beda *T-test* pada Tabel 6 diketahui bahwa rata-rata pengungkapan investasi pemerintah daerah di Jawa adalah

68,44% sedangkan pengungkapan investasi pemerintah daerah di Sumatera adalah 60,95%. Secara absolut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengungkapan investasi pemerintah daerah berbeda antara di Pulau Jawa dan Sumatera. Dari Tabel 7 diketahui bahwa nilai t pada *equal variances assumed* adalah 5,123 dengan probabilitas signifikansi 0,000 (*two-tailed*) sehingga disimpulkan bahwa rata-rata pengungkapan investasi pemerintah daerah berbeda secara signifikan antara pemerintah daerah di Jawa dan di Sumatera. Dengan demikian hipotesis keenam yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara pengungkapan investasi pemerintah daerah di Jawa dan pengungkapan investasi pemerintah daerah di Sumatera diterima. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) yang tidak menemukan perbedaan antara tingkat pengungkapan wajib dalam LKPD pemerintah daerah di Pulau Jawa/Bali dan di luar Pulau Jawa/Bali.

Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kesenjangan antara Pulau Jawa dengan pulau lainnya termasuk Sumatera dalam hal pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia dan teknologi informasi. Kesenjangan dalam hal tersebut dapat berkontribusi pada timbulnya perbedaan kemampuan antara pemerintah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera dalam melaksanakan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerahnya. Kemampuan tersebut termasuk juga dalam hal kemampuan memenuhi kewajiban mengungkapkan pos-pos dalam laporan keuangan khususnya yang berkaitan dengan pengungkapan investasi pemerintah daerah.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik daerah terhadap kepatuhan pengungkapan investasi serta membandingkan kepatuhan pengungkapan investasi antara pemerintah

daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa:

- Umur administratif pemerintah daerah secara signifikan mempengaruhi pengungkapan investasi pemerintah daerah. Dengan sistem administrasi dan tata kelola yang sudah mapan yang didukung dengan pengalaman para birokratnya, pemerintah daerah dengan umur administratif yang lebih tua memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya yang terkait dengan kewajiban pengungkapan investasi pemerintah daerah.
- Size* investasi, Jumlah SKPD, Latar belakang pendidikan kepala daerah dan *Intergovernmental Revenue* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan investasi pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) yang berpendapat bahwa Pemerintah Daerah dengan *size* yang besar memiliki masalah birokrasi yang lebih besar sehingga mengakibatkan proses penerapan SAP lebih rumit jika dibandingkan dengan pemerintah daerah yang kecil.
- Terdapat perbedaan antara pengungkapan investasi pemerintah daerah di Jawa dan pengungkapan investasi pemerintah daerah di Sumatera. Kesenjangan antara Pulau Jawa dengan pulau lainnya termasuk Sumatera dalam hal pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia dan teknologi informasi dapat berkontribusi pada timbulnya perbedaan kemampuan antara pemerintah daerah di Pulau Jawa dan Sumatera dalam melaksanakan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerahnya.

Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan penelitian ini adalah adanya keterbatasan data yang diperoleh dan dapat diolah untuk mengukur variabel-variabel dan menguji hipotesis-hipotesis penelitian. Dari 265 pemerintah kabupaten/kota yang ada di Pulau Jawa dan

Sumatera, hanya 102 sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Selain itu penelitian ini hanya menguji pengaruh lima karakteristik pemerintah daerah terhadap pengungkapan investasi pemerintah daerah, sementara masih ada karakteristik-karakteristik lain yang dapat dipilih untuk diuji misalnya tingkat kesejahteraan (*wealth*), status daerah, dan tingkat pembiayaan utang (*debtfinancing*).

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
<http://kbbi.web.id/karakteristik>
(diakses tanggal 6 Juli 2015).
- Cooke, T. E. 1992. The Impact of Size, Stock Market Listing and Industrial Type on Disclosure in the Annual Reports of Japanese Listed Corporations. *Accounting and Business Research*. Vol. 22, No. 87, pp. 229-237.
- Daft, R. L. 2012. *Organization Theory and Design*. Eleventh Edition. South-Western, Cengage Learning.
- Darmastuti, D. dan D. Setyaningrum. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Tahun 2009. *Proceedings Simposium Nasional Akuntansi 15, Banjarmasin, September 2012*.
- Jones, G. R. 2010. *Organizational Theory, Design, and Change*. Sixth Edition. Prentice Hall.
- Ghozali, I. 2013. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP UNDIP.
- Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah menguji karakteristik-karakteristik pemerintah daerah yang lain yang belum tercakup dalam penelitian ini dan mencari alternatif sumber data selain dari laporan keuangan dan situs resmi pemerintah daerah.
- Hilmi, A. Z. dan D. Martani. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *Proceedings Simposium Nasional Akuntansi 15, Banjarmasin, September 2012*.
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014*. 2014. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). 2008. *Akuntansi Dana Bergulir*. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07. Jakarta: KSAP.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Jakarta: KSAP.
- Martani, D. dan A. Lestari. 2010. Local Government Financial Statement Disclosure in Indonesia. In *Proceedings of the 2010 Annual Meeting and Conference Asian Academic Accounting Association (AAAA)*. Bangkok, Thailand: Thammasat Business School.
- Miranti, L. 2009. *Praktik Penerapan Indonesian Environmental Reporting Index dan Kaitannya dengan Karakteristik Perusahaan*. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- Patrick, P. A. 2007. *The Determinants of Organizational Innovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. Unpublished Ph.D. Dissertation. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
- Pemda. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ryan, C., T. Stanley, dan M. Nelson. 2002. *Accountability Disclosures by Queensland Local Government Councils: 1997-1999*. *Financial Accountability & Management* 18 (3): pp. 261-289.
- Sekaran, U. dan R. Bougie. 2013. *Research Methods for Business*. Sixth Edition. John Wiley and Sons Inc.
- Setyaningrum, D. dan F. Syafitri. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 9, No. 2, hal 154-170.
- Suhardjanto, D. dan S. I. Lesmana. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia. *Prestasi Vol. 6*: ISSN 1411-1497.
- _____, dan R. R. Yulianingtyas. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Auditing Vol. 8*: ISSN 1412-6699.
- Sumarjo, H. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemda terhadap Kinerja Keuangan*